

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara. Tujuan Penelitian: 1.

Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam konstruksi sistem hukum. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan solusinya.

Metode penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang aspek hukumnya. Sedangkan penelitian sosiologis yaitu mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistim norma itu bekerja dalam masyarakat, tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada dibalik tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan. yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori-teori, yakni teori sistem hokum, teori bekerjanya hukum serta tujuan hukum.

Hasil penelitian dan Pembahasan : Selaku Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Grobogan tetap professional menjalankan tugas dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pasca pembubaran tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dalam konstruksi sistem hukum yang tepat. dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun, mulai Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Grobogan telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi menunjukkan suatu capaian dari salah satu peran Kejaksaan dalam mengoptimalkan Pencegahan tindak pidana korupsi melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Memberikan pemahaman kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan bahwa penegakan hukum pasca pembubaran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bukan untuk mencari-cari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, tetapi justru memberikan advis agar supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Republik Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha Negara dan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Kata Kunci : *Efektifitas, Kinerja Kejaksaan, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a law enforcement agency that plays a role in supporting the success of governance and national development at the central and regional levels through guarding and security, both in planning, implementing and utilizing development results, including in efforts to prevent irregularities and losses to the State Research Objectives: 1. To find out and analyze the effectiveness of the performance of the Grobogan District Attorney in the context of preventing criminal acts of corruption after the dissolution of the Regional Government and Regional Development Guards and Security Team (TP4D) in the construction of the legal system. 2. To find out and analyze the obstacles faced by the Grobogan District Attorney in the context of preventing criminal acts of corruption after the dissolution of the Regional Government and Regional Development Guards and Security Team (TP4D) and their solutions.

The research method used in this study is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is an approach that studies social phenomena in society with legal aspects. While sociological research, which examines how the reactions and interactions that occur when the norm system works in society, the task of the researcher is to examine what is behind the appearance of the application of laws and regulations, which are then analyzed qualitatively using theories, namely the theory of the legal system, the theory of the operation of the law and the objectives of the la.

Results of the research and discussion: As the implementation of the duties of the Guards Team, Government Security and Regional Development (TP4D), the Grobogan District Prosecutor's Office remains professional in carrying out its duties in the context of preventing criminal acts of corruption after the dissolution of the team of guards and safeguards for government and regional development (TP4D) in the construction of the legal system right. in a period of 3 (three) years, starting in 2016, 2017, 2018 and 2019, the Team of Guards, Safeguards for Government and Regional Development (TP4D) of the Grobogan District Prosecutor's Office has handled corruption crimes, showing an achievement from one of the roles The Attorney General's Office in optimizing the prevention of criminal acts of corruption through the Regional Government and Development Guard and Security Team (TP4D). Providing understanding to the Regional Government Work Unit (SKPD) of the Grobogan Regency Government that law enforcement after the dissolution of the Guard, Government Security and Regional Development Team (TP4D) is not to find mistakes in the implementation of regional development activities, but instead provides advice so that irregularities do not occur. or fraud in the use of regional financial budgets. In carrying out law enforcement duties in a professional manner with the duties and powers of the Prosecutor's Office based on Article 30 of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Prosecutor's Office, the following are in the field of criminal, civil and state administration and in the field of public order and peace.

Keywords: Effectiveness, Attorney's Performance, Prevention of Corruption Crime

KATA PENGANTAR